

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya. Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenang pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Syabkani, 2004)

Pemerintah daerah wajib merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap daerah di Indonesia menyusun rencana pembangunan yang kemudian diterapkan pada proses pelaksanaan pembangunan di

daerah masing-masing. Undang-undang ini pada dasarnya diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang sebelumnya dirasakan dengan tujuan perbaikan, yaitu pembangunan yang terintegrasi dan sinergi antar departemen / lembaga dan antar daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta optimalisasi dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. (Sjafrizal, 2014: 3).

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam setiap perencanaan pembangunan, namun dalam prakteknya seringkali dilakukan oleh gerakan keteknikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh peran pemangku kepentingan, serta kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Cukup banyak program pemerintah dalam pembangunan yang mengambil pendekatan partisipatif, tetapi dalam prakteknya bukan bentuk partisipasi, mobilisasi, dan prosesnya bukan bottom-up, melainkan top-down. Seringkali, orang-orang dipaksa, tanpa dorongan hati nurani, untuk berpartisipasi dalam program-program yang tidak banyak berguna bagi masyarakat dengan kedok bertindak atas nama partisipasi (Kelly, 2001).

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Maksud dari kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan disini ialah

keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan di tingkat Desa seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2, bahwa salah satu kewajiban dari masyarakat desa ialah mendorong terciptanya kegiatan menyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

LPMK mempunyai tugas yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 2018 “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud asal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan” (Permendagri No 5 Tahun 2007) Dalam melaksanakan tugasnya LPMK mempunyai

fungsi yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, adapun fungsi tersebut adalah : Mengumpulkan dan menyalurkan upaya pengembangan masyarakat; b. Memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Merumuskan rencana, melaksanakan pelestarian, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penggarap dan penggerak inisiatif masyarakat, partisipasi dan swadaya; f. Penggalian, eksploitasi dan pengembangan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, muncul beberapa permasalahan yang nampaknya perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah konsistensi acuan pembangunan yang musti dilaksanakan termasuk didalamnya konsep perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif yang telah dikampanyekan tetapi ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Program ini sebenarnya akan menjadi sangat strategis apabila dilaksanakan dengan tepat tetapi akan menjadi sangat tragis manakala kerangka ini hanya sebagai *lips service* untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah aspiratif bahkan membangun berdasarkan kerangka kebutuhan nyata rakyatnya.

Oleh karenanya aspek pelibatan masyarakat dan manajemen sangat relevan dalam kaitan ini menyangkut perencanaan. Perencanaan ini menyatakan tujuan organisasi dan menentukan prosedur terbaik untuk mencapainya, dimana suatu proses keputusan rasional dalam alokasi sumber dana untuk mencapai tujuan tertentu

mengacu pada masa lalu dan kondisi sekarang untuk untuk melangkah dimasa yang akan datang

Kecamatan Dlingo terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Bantul dengan luas 3.797.803 hektar. Desa Dlingo terletak di ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Jarak dari Kapanewon ke pusat pemerintahan Kabupaten Bantul adalah 23 km. Wilayah Desa Dlingo 100% berbukit. Desa Dlingo dihuni oleh 8.894 KK, jumlah penduduk Desa Dlingo adalah 36.514 jiwa. Potensi yang ada di 2 Kelurahan Dlingo yaitu kerajinan mebel, bambu, daun pintu, wisata budaya dan wisata alam goa gajah.

Permasalahan sosial yang ada di Dlingo, khususnya mengenai aspek partisipasi masyarakat permukiman. Hal tersebut antara lain: Mekanisme perencanaan pembangunan bottom-up yang dilaksanakan dari tingkat RT hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa belum menyebabkan masyarakat memutuskan kegiatan prioritas, sedangkan untuk membuat rencana pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran secara efisien memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. perencanaan karena masyarakat mengetahui masalah dan kebutuhan yang dimilikinya sehingga keterlibatan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan. Selain itu di Kecamatan Dlingo, usulan yang diajukan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa cenderung berupa rumusan elit desa dan sejumlah kecil tokoh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat yang sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Kegiatan Musrenbang

Desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Dlingo ternyata hanyalah kegiatan formalitas yang melibatkan aparat desa dan sejumlah kecil masyarakat yang tidak mewakili seluruh masyarakat Desa Dlingo. Pada akhirnya, dokumen perencanaan dibuat tanpa ada saran dari masyarakat, tetapi hanya berupa asumsi dan perkiraan oleh perangkat desa.

Selain itu, proses perencanaan pembangunan tidak diawali dengan kegiatan persiapan untuk mendapatkan data yang valid tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat kenyataan di lapangan. Data yang valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen penting yang harus dihadirkan dan dijadikan bahan untuk kegiatan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses merumuskan alternatif atau keputusan berdasarkan data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan / kegiatan sosial baik secara fisik (mental maupun spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan, yang menyebabkan sikap apatis masyarakat terhadap perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Pada saat proses perencanaan, tidak masuk akal bagi masyarakat untuk terlibat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa belum mendapatkan komunikasi detail

proses perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana musrenbangdes, untuk keperluan apa, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat dilihat kaitan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan partisipasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan adalah: LPMK mempunyai peran sangat besar yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya mengenai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan. Karena LPMK merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu lembaga ini merupakan lembaga yang ditetapkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah:

Bagaimana partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengantar ilmu pemerintahan dan memberikan informasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalurahan Dlingo, pemerintah setempat dan bahan informasi bagi pemerintahan DIY dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pemerintah , khususnya tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dimasa-masa yang akan datang.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul Penelitian, Peneliti dan Tahun Penelitian | Hasil Penelitian                   |
|-----|---|------------------------------------|
| 1.  | Partisipasi Masyarakat Dalam                    | Perencanaan yang belum optimal ini |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Di desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (Aris Tri Cahyo, 2016)</p>   | <p>disebabkan oleh kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Desa Wisata Limbasari versus Desa Wisata. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap perencanaan pembangunan desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga keterlibatan masyarakat masih kurang. Selain itu Desa Limbasari kekurangan infrastruktur untuk menjadi desa wisata</p> |
| 2 | <p>Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2014 (Ella Yuvita Sari Wiranti, 2015)</p> | <p>LPM belum berperan baik di Kelurahan Sei Lekop hal ini terlihat dari Setiap kegiatan yang dilakukan belum membawa perubahan dalam pembangunan di Kelurahan Sei Lekop, karena seharusnya pembangunan yang dimulai dari perencanaan akan melibatkan masyarakat, kenyataannya tidak</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>semua masyarakat memahami tentang pentingnya ikut dalam suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan dilakukan pada tahun 2014 hanya sekali saja namun tidak ada konfirmasi kembali kepada masyarakat</p>   |
| 3. | <p>Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan (Abit Muhtarom, Jurnal Universitas Islam Lamongan Volume I No. 3 2016)</p> | <p>Gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Penelitian ini meneliti mengenai peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) di kabupaten Lamongan sehingga hasil penelitian diperoleh secara umum sedangkan penelitian yang akan datang di fokuskan pada satu wilayah LPMK yaitu pada satu kelurahan, kelurahan Banjardowo sehingga lebih terfokus mengenai peran LPMK dalam pemberdayaan</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Masyarakat..  |
| 4. | Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa (Novita Lenak, 2015)                                     | Evaluasi kegiatan dengan mengadakan rapat desa, namun rapat desa yang diselenggarakan tidak dapat optimal, masyarakat tidak begitu antusias dalam mengikuti rapat desa. Tetapi di sisi lain masyarakat lebih antusias pada saat mengikuti pelaksanaan pembangunan desa.   |
| 5. | Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta (P Wigit Edi Bowo, 2017) | Peran lembaga penguatan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Jebres dipersepsikan sebagai mediator pertimbangan perencanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan dana hibah khusus dari Pemerintah Kota Surakarta. Pelaksanaannya dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan dan evaluasi. |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Kendalanya, pertama, waktu pengumpulan hasil pertimbangan perencanaan pembangunan desa terlalu mendesak. Kedua, masih banyaknya masalah yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran pembangunan desa. Ketiga, aspirasi The Basis seringkali tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan pertimbangan perencanaan pembangunan desa.</p> |
| 6. | <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa, Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Syahrul Syamsi, 2017)</p> | <p>Pengelolaan ADD masih kurang baik, partisipasi Masyarakat masih lemah, hal itu disebabkan oleh keputusan yang kurang bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran Masyarakat Dan pendidikan yang rendah.</p>   |
| 7. | <p>“Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo</p>  | <p>Belum adanya aktivitas transparansi keuangan dari pemerintah ke masyarakat. Salah satu contoh adalah belum adanya papan informasi dan</p>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul<br/>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<br/>Tahun 2016 (Posta Arwanto, 2017)</p>   | <p>baliho terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu permasalahan juga terdapat pada keterlambatan penyusunan pertanggung jawaban realisasi anggaran. Ini terjadi karena adanya ketidak pahaman dari tim pelaksana kegiatan. Hal ini terjadi karena belum adanya system keuangan desa (SISKUEDES) sehingga program yang seharusnya dilaksanakan belum terlaksana.</p> |
| 8. | <p>Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop) (Rintaka Hargita Sandhi, 2015)</p> | <p>1) Penetapan peraturan LPMD didasarkan pada hasil musyawarah pengurus dan anggota. 2) Partisipasi tetap berpusat pada desa itu sendiri, jika asesmen desa memperkuat peran LPMD. 3) Desa masih membantu LPMD dalam melaksanakan kepesertaan, 4) belum dilaksanakan secara optimal atau menyeluruh dari</p>   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>segi partisipasi LPMD, 5) realisasi peran LPMD kurang terarah dan tidak membayar memperhatikan informasi dari LPMD, 6) Organisasi LPMD belum dirumuskan secara spesifik dan tugas pengelolaan LPMD belum terlaksana dengan baik.</p>    |
| 9.  | <p>Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 (Studi Kasus di desa Sendangrejo Kecamatan Minggrie Kabupaten Sleman) (Shinta Istiana, 2017)</p> | <p>belum semua kecamatan memiliki kepala desa perempuan . dalam hal ini penulis mendapati masalah bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik masih mengalami kendala. Kendala dari segi kultural maupun dari segi structural</p>       |
| 10. | <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Rahma Dian Puspitasari, 2017)</p>         | <p>Masalah dengan perkembangan tersebut adalah masyarakat Desa Wayang masih kurang berpartisipasi dalam berwirausaha. Sejalan dengan pernyataan Pemerintah Desa Wayang yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Wayang sebenarnya</p> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>ingin diajak untuk ikut serta dalam masalah swadaya / gotong royong, masalahnya ada dusun yang sulit dijangkau. bekerja dengan dan pada dua dukuh lainnya aktif ketika mereka diundang untuk berkolaborasi. Hal ini terlihat dengan keberadaan gereja pada saat proses pembangunan. Di satu Dusun yang dianggap kurang aktif, lebih sedikit orang yang hadir pada saat pembangunan dibandingkan di dua Dusun lainnya, di mana lebih banyak orang yang hadir dan berpartisipasi dalam gotong royong / swadaya.</p> |
| 11. | <p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa): studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Imamuddin,</p> | <p>Implementasi dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat terlihat, namun belum dapat dilakukan secara maksimal karena program yang ada dan yang sedang berjalan belum dapat</p>   |

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 2018) | <p>menjangkau seluruh individu Desa Payaman dan BUMDesa yang telah berusaha dan melaksanakan kebutuhan masyarakatnya. sudah menjalankan apa yang menjadi pendukung BUMDes menjalankan program-program diantaranya: kebutuhan masyarakat. istilah sederhana. Bunga kecil. Kebutuhan gereja terus bertumbuh. Banyak penduduk desa menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Kurangi pengangguran di antara penduduk, bahkan jika itu adalah pekerjaan paruh waktu kecil. Perawatan mudah. Pemasaran Sederhana. Tanah tidak harus besar. Faktor penghambat yang muncul di bidang ini antara lain: Masalah permodalan yang tidak memadai, yang menyebabkan adanya</p> |
|--|-------|--|

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>pembatasan peminjaman bila ada masyarakat yang meminjam banyak modal. Pedagang kurang terorganisir dalam mengelompokkan barang. Ada pedagang yang kurang rapi karena masih berdagang di pintu masuk. Kurangnya kesadaran di kalangan pedagang. Lahan parkir yang tidak cukup luas akan mengganggu warga yang menyeberang jalan di sekitar pasar. Belum ada masukan dan keluaran. Cuaca panas. Membutuhkan banyak air saat musim panas tiba. Pakan lele itu mahal.</p> |
| 12. | <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di Desa Limbangsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (Aris Tri Cahyo Purnomo, 2016)</p> | <p>Ada beberapa bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa wisata yaitu adanya dan kontribusi pemikiran. Sementara itu, ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan pembangunan desa</p>  |

|     |                              |  |
|-----|------------------------------|--|
|     |                              | <p>wisata. Faktor pendukung terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menunjang kegiatan yaitu semangat dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi serta adanya pemimpin pemerintahan desa untuk menyemangati masyarakat. Faktor pendukung eksternal adalah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam perencanaan kegiatan. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan desa wisata ini yang ditemukan dalam penelitian. Faktor-faktor tersebut adalah proses sosialisasi yang belum optimal, kesibukan individu masyarakat, kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia.</p> |
| 13. | Partisipasi Masyarakat dalam | Sebanyak 40% responden memiliki  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <p>Pembangunan Desa Wisata dan Tingkat Taraf Hidup Masyarakat (Mona El Sahawi, 2016)</p>                                   | <p>tingkat partisipasi yang rendah dan 40% memiliki partisipasi yang tinggi. Adanya hubungan yang sedang dan signifikan antara tingkat Pendidikan dan tingkat partisipasi. Adanya hubungan sangat kuat dan signifikan antara faktor eksternal yaitu metode pelaksanaan kegiatan dan tingkat partisipasi. Sebanyak 54% responden memiliki taraf hidup yang tinggi. Hubungan antara tingkat partisipasi dan tingkat taraf hidup masyarakat menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan.</p> |
| 14. | <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah (Dea Deviyanti, 2013)</p> | <p>Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati kurang maksimal karena masyarakat setempat tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilakukan</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>oleh pemerintah daerah tanpa swadaya masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana). Masyarakat hanya membantu dirinya sendiri dalam bentuk pekerjaan. Selain itu pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan di Desa Karang Jati yang membawa manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Masyarakat juga dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mendukung masyarakat tersebut sebenarnya tergantung dari keinginan masyarakat itu sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat di Desa Karang Jati, masih terdapat berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat pada</p> |
|--|--|---|

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>pemerintah, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi mereka dalam pembangunan dan kurangnya waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan karena faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya sosialisasi pihak terkait terkait dengan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di masyarakat.</p>                    |
| 15. | <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Rahma Dian Puspitasari, 2017)</p> | <p>Masalah dengan perkembangan tersebut adalah masyarakat Desa Wayang masih kurang berpartisipasi dalam berwirausaha. Menurut pernyataan Pemerintah Desa Wayang yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Wayang sebenarnya ingin diajak untuk ikut serta dalam masalah swadaya / gotong royong, masalahnya ada dusun yang sulit untuk diajak. untuk bekerja dengan</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>mereka, dan di sisi lain dua dukuh lainnya aktif ketika diundang untuk berkolaborasi. -royong. Hal ini terlihat dengan keberadaan gereja pada saat proses pembangunan. Di satu Dusun yang dianggap kurang aktif, lebih sedikit orang yang hadir pada saat pembangunan dibandingkan di dua Dusun lainnya, di mana lebih banyak orang yang hadir dan berpartisipasi dalam gotong royong / swadaya.</p> |
|--|--|---|

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, kemudian persamaan penggunaan metode penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengenai lokasi penelitian dan fokus penelitian, dimana peneliti ini memfokuskan pada perencanaan pembangunan di kelurahan

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah peran seseorang atau kelompok dalam masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk deklarasi maupun kegiatan, dengan menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (I Nyoman Sumardi, 2010: 46)

Partisipasi ditunjukkan oleh (Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001: 201-202), dimana partisipasi juga dapat diartikan sebagai pengambil keputusan yang mengusulkan suatu kelompok atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. untuk berpartisipasi. Partisipasi juga dapat berarti kelompok mengenali masalahnya sendiri, memeriksa pilihan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.

Menurut Slamet (1994: 27-28) partisipasi diartikan sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut, sehingga bentuk partisipasi ini dapat digambarkan sebagai partisipasi aktif. Jika mereka membatasi diri untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka dalam pengembangan, ini dapat digambarkan sebagai bentuk partisipasi pasif. Siagian (1985: 10) menjelaskan secara panjang lebar bahwa partisipasi pasif merupakan sikap, perilaku dan tindakan yang tidak menghalangi suatu proses kegiatan perkembangan, dan partisipasi aktif dijelaskan oleh Siagian, yaitu:

- a. Menunjukkan adanya rasa kesadaran pada setiap pribadi masyarakat dalam bersosial dan bernegara.
- b. Turut ikut dalam memikirkan nasib perseorangan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di lingkungan masyarakat sebagai sarana wadah untuk menyampaikan aspirasi.
- c. Taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rela berkorban melakukan yang dituntut untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat bersama.
- e. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab, contohnya seperti membayar pajak untuk kepentingan negara dan orang banyak .

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa, ketersediaan masyarakat pada setiap anggota masyarakat untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi demi terwujudnya masa depan yang semakin baik.

Menurut Ericson (Slamet, 2004: 89) bentuk partisipasi dalam pembangunan dibagi menjadi tiga (tiga) tahap, yaitu: 1) partisipasi dalam perencanaan, 2) partisipasi dalam implementasi, 3) partisipasi dalam penggunaan dan menurut Cohen dan Uphoff (Dwiningrum. 2011: 6)) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) partisipasi dalam

pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) partisipasi dalam evaluasi , pernyataan berikut:

1) Partisipasi dalam perencanaan

Pendekatan partisipatif dalam suatu perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam proses pembangunan. Perencanaan adalah keseluruhan proses berpikir dan menentukan secara matang apa yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu (Wikirannolo dan Nugroho. 2006: 40).

Partisipasi pada tahapan ini merupakan keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan (Slamet, 2004:89).

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam tahapan ini merupakan partisipasi seseorang dalam tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan energi berupa uang, barang atau jasa, dan gagasan atau gagasan sebagai wujud partisipasi dalam kegiatan tersebut (Slamet,

2004: 90). Nilai positif dari partisipasi ini adalah sebagian besar program selesai (penilaian kebutuhan dan perencanaan program).

### 3) Partisipasi dalam pemanfaatan

Partisipasi pada tahapan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu program atau kegiatan tersebut ketika sudah selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini dapat berupa tenaga dan uang untuk memelihara proyek yang telah dibangun (Dwiningrum, 2011:61).

### 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya program, yang dapat dimonitor secara berkala, apakah kegiatan atau program tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Jika dilihat dari penjelasan tentang jenis-jenis atau bentuk partisipasi di atas, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk partisipasi pelaksanaan yang dapat disimpulkan bahwa partisipasi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam evaluasi

### **1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis, empowerment berasal dari kata dasar “power” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan definisi tersebut, pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses pemberdayaan atau sebagai proses memperoleh kekuasaan / kekuatan / kemampuan atau sebagai proses pemberian kekuasaan / kekuatan / kemampuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak-pihak yang kurang atau kurang berdaya untuk itu. ditafsirkan. Prijono & Pranaka (1996: 77) menyatakan bahwa: Pemberdayaan memiliki dua arti. Definisi pertama adalah memberikan kekuasaan atau otoritas dan yang kedua adalah memberi atau mengaktifkan kemampuan.

Makna pertama meliputi pemberian kekuasaan, penyerahan kekuasaan, atau pendelegasian wewenang kepada pihak-pihak yang kurang atau kurang berdaya. Di sisi lain, makna yang kedua adalah memberikan ketrampilan atau pemberdayaan dan memungkinkan pihak lain untuk melakukan sesuatu. Mengenai pentingnya konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa hakikat pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (pemberdayaan), penguatan potensi atau kekuasaan (pemberdayaan), dan penciptaan kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75).

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah penciptaan suasana atau iklim di mana potensi masyarakat dapat berkembang (memungkinkan). Logika ini

didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Setiap masyarakat pasti memiliki kekuasaan, namun terkadang mereka tidak menyadarinya atau bahwa kekuasaan tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Karenanya energi harus diekstraksi dan kemudian dikembangkan. Ketika asumsi ini berkembang, pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan dengan cara mempromosikan, memotivasi, dan membuat peka potensi seseorang dan berusaha mengembangkannya. Lebih jauh, pemberdayaan hendaknya tidak menjebak masyarakat dalam jebakan kecanduan, melainkan pemberdayaan harus mengarah pada proses kemandirian. (Tri Winarni, 1998).

Pemberdayaan berarti menghasilkan sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan (Suparjan & Hempri, 2003: 43). Konsep utama pemberdayaan adalah menawarkan kesempatan yang luas kepada orang-orang untuk menentukan arah hidup mereka sendiri di komunitas mereka. Pemberdayaan menempatkan pengambilan keputusan otonom dari suatu kelompok masyarakat di bawah tekanan. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan fokus pada lokalitas akan menjadi dasar bagi upaya penguatan potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada pemberdayaan individu anggota masyarakat dan lembaganya. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak

hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Dalam konteks pemberdayaan sebenarnya mengandung unsur partisipasi, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan menekankan pengenalan subjek atas kemampuan atau kekuatan objek tersebut. Secara umum, proses ini melihat pentingnya proses ini dalam mentransformasikan makna mentransformasikan orang yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

### **1.6.3 Pembangunan Desa**

Dalam kamus bahasa Indonesia, pembangunan berasal dari kata "membangun" yang artinya "bangkit". Perkembangan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi masa depan memiliki beberapa pengaruh, antara lain sebagai berikut:

1. Artinya memperhatikan "kapasitas" dari apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kapasitas dan energi untuk melakukan perubahan.
2. Pembangunan kekuasaan dan kewenangan dalam arti masyarakat memiliki kekuasaan dan kewenangan tertentu mendapat manfaat dari pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 4), pembangunan adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan terencana dan sadar suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Listyaningsih (2014: 18) pembangunan diartikan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan pertumbuhan yang terencana dan sadar serta

perubahan yang dilakukan suatu negara ke arah yang lebih baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014: 44) istilah pembangunan belum menemukan kesepakatan makna seperti modernisasi. Pembangunan secara umum diartikan sebagai rangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan terencana yang dilakukan oleh suatu negara dan bangsa menuju era modern. Pembangunan tersebut juga bertujuan untuk mengubah paradigma atau cara berpikir masyarakat dari tradisional menjadi modern. Baginya, esensi dari pentingnya pembangunan merupakan proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan.

Sementara itu keras. Listyaningsih (2014) mengemukakan bahwa pembangunan adalah peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dipandang sebagai perkembangan ekonomi dan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut Yusuf, banyak pakar politik yang memperhatikan perkembangan politik. Dilihat dari tujuannya, perkembangan politik mengarah pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi, dan sebagainya. Sementara itu, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk stabilitas politik, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Lebih lanjut menurut Afifuddin (2012), hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara utuh untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Rostov dalam Arief Budiman (2000: 25), pembangunan adalah suatu proses yang bergerak dalam garis lurus yaitu dari masyarakat yang terbelakang menuju masyarakat yang maju. Menurut Husein Umar (2004: 8), pembangunan dapat diartikan sebagai upaya menggunakan sumber daya untuk mencapai keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah segala proses perubahan yang terjadi melalui upaya sadar dan terencana. Sedangkan implementasi merupakan strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui lebih jelas apa yang diinginkan masyarakat dalam kehidupannya. Memang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun seringkali upaya dan niat baik tersebut tidak menjangkau semua masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan daripada di pedesaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan

kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana. desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya, alam, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mengarusutamakan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun rencana pembangunan yang berkaitan dengan rencana pembangunan kabupaten / kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa dan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pertimbangan perencanaan pembangunan desa menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sjafrizal (2016: 15), perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bersifat multidisiplin karena cakupannya yang luas, meliputi aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, kenegaraan, dan fisik. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah membutuhkan tim perencana yang memiliki berbagai keahlian di bidang ilmu terkait seperti

perencanaan, keteknikan, ekonomi, pertanian, hukum, pemerintahan, dan sosial budaya.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa dikomunikasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi dan memantau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan penguatan masyarakat desa di perdesaan.

Pembangunan pedesaan meliputi:

1. Pemanfaatan dan pemanfaatan kawasan desa sebagai bagian dari pengertian kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten / kota;
2. Layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
3. Pengembangan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan akses layanan dan kegiatan ekonomi.

Terdapat tiga prinsip utama pembangunan pedesaan:

1. Kebijakan dan langkah pembangunan di setiap desa terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Tiga elemen trilogi pembangunan adalah:
  - a. Perkembangan dan Hasil yang Adil;
  - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
  - c. Stabilitas sehat dan dinamis yang diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah, saling berhubungan dan berkembang secara harmonis dan terpadu.
2. Pembangunan desa berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debrokrasi dan desentralisasi semaksimal mungkin.

#### **1.6.4 Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan adalah proses pencapaian tujuan pemerintah. Banyak faktor yang terlibat dalam perkembangan ini saling terkait. Pembangunan tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang disebut perencanaan pembangunan, tetapi pemerintahlah yang memegang peran terpenting dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah arah penggunaan sumber daya pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan situasi sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014).

Widjojo Nitisastro (2014) menjelaskan apa saja yang termasuk dalam perencanaan pembangunan yaitu:

1. Membuat keputusan sadar tentang tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan nilai-nilai komunitas yang terkena dampak.
2. Pilihan antara cara alternatif yang efisien dan rasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan biasanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu, sehingga perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan selalu merupakan loop proses yang berkesinambungan. Perencanaan mengacu pada hubungan intrinsik antara kebutuhan pembangunan dan administrasi pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan berbagai kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berapa banyak dan berapa banyak bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa. Menurut ruang lingkupnya, perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi perencanaan

nasional, sektoral dan tata ruang. Di tingkat pemerintah, perencanaan pembangunan dapat berbentuk perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Dari segi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam hal proses dan mekanisme, sebuah rencana dapat berupa top-down atau bottom-up, dan dapat merupakan kombinasi dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Listyaningsih, 2014: 93).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok untuk mendorong proses pembangunan yang terintegrasi dan efisien. Maksud dan tujuan utama adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, pengaturan waktu dan fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
3. Pastikan bahwa ada hubungan dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, implementasi dan pemantauan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5. Jaminan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif dan adil

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses yang dipilih dan dilaksanakan secara sadar untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

#### **1.6.5 Perencanaan Pembangunan Desa**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin terlihat jelas bahwa desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa peraturan desa adalah desa dan desa bersama atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingannya. adalah masyarakat lokal melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang begitu besar, desa harus menyusun rencana pembangunan berupa rencana pembangunan desa jangka menengah yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan RKP Desa tahunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan pedoman atau model untuk menggali potensi dan gagasan pembangunan desa yang

mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara keseluruhan (Supeno, 2011: 32).

Selain itu, Supeno (2011: 32) menyatakan bahwa uraian tentang perencanaan desa memiliki arti sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai rangkaian kegiatan analitis mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat hingga menentukan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan; Semua program untuk meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di wilayah pemukiman di tingkat RT / RW, dusun, dan desa.
3. Perencanaan pembangunan didasarkan pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun masa depan.
5. Perencanaan yang mengarah pada program pembangunan yang diharapkan berdampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat.

Menurut Supeno, sangat jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses mencari ide, melibatkan masyarakat, dan mengidentifikasi sumber daya yang ada.

Pemikiran Supeno sesuai dengan pendapat Robinson Tarigan (2009: 5). Ada empat elemen dasar perencanaan: (1) perencanaan pemilihan sumber daya, (2) perencanaan adalah alat untuk alokasi sumber daya, (3) perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan, (4) perencanaan berwawasan ke depan

Dalam merencanakan pembangunan desa, desa tidak hanya harus memperhatikan kondisi desa tetapi juga tata kota kabupatennya. Dan ketika menyusun perencanaan pembangunan, pendapat ahli perencanaan harus bersifat jangka panjang. RPJM Desa sesuai dengan Pasal 79 ayat 1 huruf a. Rencana pembangunan desa jangka menengah untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya perencanaan pembangunan desa telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasinya dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa RKP Desa. Gambaran teoritis menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari semua proses. Dengan perencanaan yang baik diharapkan penyelenggaraan pembangunan desa menjadi mungkin, terukur, lebih baik dan dalam jangka panjang.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Partisipasi**

Partisipasi adalah keterlibatan suatu kelompok atau secara personal dalam lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi atau sumbangsi dalam bentuk pemikiran, keikutsertaan merumuskan tahapan suatu kebijakan dalam perencanaan maupun pelaporan. Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini menurut penulis yaitu konsep partisipasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) dan Soetrisno (1995: 208). Bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menurut Rohmad (2016: 142-143) yang terdiri dari uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran/ide, terdapat penggabungan teori dalam partisipasi harta benda yaitu menurut Rohmad (2016: 142-143) dan Huraerah (2008: 102 dalam Laksana, 2013: 610). Untuk tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan, sedangkan menurut Uphoff dan Cohen dalam Dwiningrum (2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) Partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Dalam defnisi konseptual dari partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dan sinergitas atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan, hal ini menjelaskan partisipasi menjadi kedalam beberapa tahapan yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dan;
3. Partisipasi dalam evaluasi.

Selanjutnya, bentuk lain partisipasi yang dapat disumbangkan yaitu uang, harta benda, gagasan atau ide, tenaga dan keterampilan lainnya.

### **1.7.2 Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian dari penulis yaitu menurut T.R Batten (1979, dalam Anwar, 2012: 83), B.S Muljana (1995: 3), dan Kuncoro (2010, dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan Desa pada bangunan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, mulai dari proses diskusi dan menentukan keinginan, merencanakan, dan mengerjakan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik (pembangunan yang dapat langsung dirasakan dan tampak oleh mata) seperti jalan, gedung sekolah, tempat ibadah, saluran irigasi, talud, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan serta kegiatan dalam masing-masing tahapan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dlingo.

## **1.8 Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul sebagai berikut :

### **1. Partisipasi**

#### **a. Partisipasi dalam pengambilan perencanaan pembangunan**

- 1) Kehadiran rapat, diskusi
- 2) Sumbangan pemikiran

#### **b. Partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan**

- 1) Koordinasi dan penjabaran program

#### **c. Partisipasi dalam pelaporan atau evaluasi**

- 1) Kendala program yang telah direncanakan sebelumnya

### **2. Pembangunan Desa**

#### **a. Pembangunan Fisik**

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan

rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.

b. Pembangunan Non fisik

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pembangunan skill atau kemampuan tertentu, para pencari kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu, tenaga ahli dan teknisi, dan sebagainya.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis, atau lisan dan juga perilaku dari orang yang dapat diamati (Moleong 2006). Didalam penelitian kualitatif juga menekankan bahwa peneliti harus memiliki kedekatan dengan orang-orang dan juga situasi yang diteliti, agar peneliti mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana realitas dan kondisi nyata yang ada (Sugiyono 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus karena unit analisis dari penelitian ini adalah kasus itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat dari keadaan maupun

hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya dan juga pendekatan kualitatif ini lebih banyak berhubungan dengan keadaan yang ada di kehidupan sehari-hari, dimana pendekatan ini lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Itulah yang menyebabkan mengapa urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan bagaimana kondisi serta banyaknya gejala-gejala yang ditemukan..

### **1.9.2 Jenis Data**

#### a. Data primer

Jenis data ini akan diperoleh secara langsung tanpa diwakilkan, menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dapat memberikan pengetahuan dan fakta yang ada dilapangan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

#### b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui jurnal, web, buku untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai studi-studi terdahulu mengenai perencanaan pembangunan desa.

### **1.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, web resmi, artikel dan berbagai info di DIY, dengan dokumen yang dibutuhkan berupa data tentang perencanaan pembangunan desa

b. Wawancara

Metode wawancara mempermudah peneliti dalam mencari data langsung dengan tatap muka secara lisan untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan responden. Dalam penelitian ini informan yang dipilih yaitu:

3. Perangkat Kalurahan Bagian Kepala Urusan Perencanaan

4. Ketua LPMK

#### **1.9.4 Teknik Analisa Data**

Dalam analisis data, data hasil wawancara, studi pustaka, dan sumber data lainnya dideskripsikan dan dihimpun secara sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam perencanaan pembangunan.

Menurut (Ivanovich Agusta, 2014) Teknik analisis data yang dilakukan peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, diantaranya:

- a. Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian.
- b. Reduksi data yaitu pengumpulan data secara kasar dilokasi, reduksi data dapat dilakukan melalui ringkasan.
- c. Penyajian data merupakan penyajian yang menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang telah dirangkum dan disajikan dalam suatu laporan yang telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.
- d. Menarik kesimpulan dari data penelitian yang telah diperoleh dan yang telah diperkecil menjadi berupa laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan juga menyeleksi data yang mengarah pada masalah sehingga masalah yang ada dapat terjawab dan kesimpulan yang valid dapat ditarik.

